

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DAN
TINDAKPIDANA PILKADA TAHUN 2020 OLEH SENTRA
PENEGAKANHUKUMTERPADU DI KABUPATEN LIMAPULUH
KOTA**

TESIS

HadiSaputra,S.H.

1920112047



Pembimbing :

1. Dr. Yoserwan, SH.,LLM
2. Dr. Khairul Fahmi, SH.,MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU
HUKUMPASCASARJANA FAKULTAS
HUKUMUNIVERSITASANDALAS
PADANG
2022**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DAN
TINDAKPIDANA PILKADA TAHUN 2020 OLEH SENTRA
PENEGAKANHUKUMTERPADU DI KABUPATEN LIMAPULUH
KOTA**

Oleh:Hadi Saputra(1920112047)

(Dibawah bimbingan: Dr. Yoserwan, S.H., M.H.,LL.M. dan Dr. Khairul
FahmiS.H.,M.H.,)

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana pemilu dan pilkada merupakan instrument untuk mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil. Penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh Gakkumdu. Adapun Sentra Gakumdu ada dipusat maupun didaerah Kabupaten/kota yang ditangani oleh Sentra Gakumdu Lima Puluh Kota yang menangani mulai dari laporan dan temuan hingga pemeriksaan oleh pengadilan, di Kabupaten lima puluh kota dalam Pemilu 2019 ada masuk 4(empat) temuan, dan 6(enam) dari laporan, atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 dan untuk pilkada tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 6 (enam) kasus temuan dan hanya 1 (satu) kasus yang sampai ke Pengadilan, berhubungan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsure Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu dan pilkada serta pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan umum tahun 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Lima Puluh kota?; bagaimanakah pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Lima Puluh kota?. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Adapun data penelitian iniyaitu primer dan sekunder, dimana data primer yaitu berupa wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa ketentuan peraturan perundangan berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : pertama penanganan pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Lima Puluh Kota terdapat: 4 kasus berasal dari temuan dan 6 kasus berasal dari laporan. Hanya 1 kasus yang berasal dari temuan dengan Nomor 005/TM/PL/03.10/IV/2019 atas nama terlapor Yeni Zafitri yang telah diproses mulai dari tahap penerimaan temuan atau laporan hingga tahap pemeriksaan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2021/PT.Pdg. kedua, penanganan pidana pilkada oleh Sentra Gakkumdu Lima Puluh Kota dari 6 kasus, hanya 1 kasus berasal dari temuan yang dinaikkan ketahap penyidikan hingga pemeriksaan oleh pengadilan. Temuan tersebut dengan Nomor 005/TM/PL/03.10/IV/2019 atas nama terlapor Wisna Lendrawati yang telah diproses mulai dari tahap penerimaan temuan atau laporan hingga tahap pemeriksaan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2021/PT.Pdg..

Kata kunci: Pidana, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Sentra Penegakan Hukum Terpadu

**HANDLING OF CRIMINAL ACTIONS OF THE 2019 ELECTION
AND THE CRIMINAL ACTION OF ELECTION OF REGIONAL HEAD
N**

2020

**BY THE INTEGRATED CENTER OF LAW
ENFORCEMENT IN THE LIMA PULUH KOTA REGENCY**

Hadi Saputra, Yoserwan, Khairul Fahmi¹

ABSTRACT

General Elections and Regional Head Elections are a political contestation in choosing and determining the leader of a region as well as determining people's representatives based on their electoral area. In the context of holding General Elections and Regional Head Elections every 5 (five) years as part of the democratic system in Indonesia, it is possible that there will be violations related to the General Election and Regional Head Election. Violations that occur can be carried out by the organizer of the General Election and/or Regional Head Election, candidate pairs in the General Election and Regional Head Election as well as a successful team or volunteers from certain pairs of candidates. Criminal violations of the 2019 general election that occurred in the Lima Puluh Kota Regency, Sumatera Barat province, there are 10 (ten) cases. Meanwhile, there are

6 (six) cases of violations of the 2020 regional head elections that occurred in Lima Puluh Kota Regency, which were sourced from the findings of. Based on this, the formulation of the problem in this writing, namely: (1) How is the handling of criminal acts in the 2019 general election by the Integrated Law Enforcement Center in the Lima Puluh Kota Regency; (2) How is the handling of the criminal act of the 2020 Regional Head Election by the Integrated Law Enforcement Center in Lima Puluh Kota Regency. There is empirical legal research where the data are obtained from the community. From the results of the study, it was concluded that: In terms of handling general election crimes by the Lima Puluh Kota Integrated Law Enforcement Center out of 10 (ten) cases, only 1 (one) case originated from finding that were raised to the stage of investigation until examination by the court where evidence was found. Evidence of violations of criminal acts of general elections as described in article 516 of Law Number 7 of 2017 concerning general elections, namely by imprisonment for 2 (two) months and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) provided that the fine is not paid is replaced with imprisonment for 2 (two) months. Then, in terms of handling the crime of Regional Head Elections by the Lima Puluh Kota Integrated Law Enforcement Center out of 6 (six) cases, only 1 (one) case stems from finding that are raised to the investigation stage until examination by the court as regulated in the General Election Commission Regulation. Number 11 of 2020 concerning Amendments to General Election Commission Regulation Number 4 of 2017 concerning Election Campaigns for Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors, and General Election Commission Regulation

¹Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, Padang, West Sumatra, Indonesia.

